

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FALKUTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) DI DESA WONOSARI KECAMATAN
BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



KHAIRUL FATHONI

NPM : 147310757

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2019**

**PERANAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA
MILIK DESA (BUMDes) DI DESA WONOSARI KECAMATAN
BENGKALIS KABUPATEN BENGKALIS**

ABSTRAK

KHAIRUL FATHONI

Kata Kunci : Peranan, Pengelolaan dan BUMDes

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Indikator penilaian yang digunakan meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Penggerakan dan Pengawasan. Tipe penelitian ini berlokasi di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis ini adalah survey deskriptif, yaitu memprioritaskan daftar kuisioner sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul dengan alat ini kemudian dijadikan bahan baku utama untuk menganalisis kondisi empiris dan obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi yang diteliti. Populasi sampel pada penelitian ini berjumlah 32 orang, yaitu mereka yang menjadi staff BUMDes dan masyarakat Desa Wonosari. Dalam penelitian ini penarikan sampel dilakukan dengan teknik sensus dan menggunakan rumus slovin. Untuk teknik sensus dilakukan pada Kepala Desa Dan Staff BUMDes Unggul Sari sedangkan rumus slovin untuk masyarakat. Semerntara teknik analisis data dengan mempergunakan alat bantu tabel frekusensi. Berdasarkan teknik analisis data ini peneliti menilai Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Berada pada interval Kurang Berperan hal ini terlihat dari jawaban 32 responden dari tiga indikator yang ada memperoleh nilai 66,48 berdasarkan item penilaian dikategorikan Kurang Berperan. Rekomendasi yang perlu di pertimbangkan yaitu terutama dengan pengelolaan terhadap BUMDes lebih ditingkatkan lagi dan lebih tegas dalam melakukan pengawasan dengan meminta laporan unit usaha, kemudian lebih sering melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes sehingga masyarakat dapat ikut serta dalam memajukan BUMDes tersebut.

ROLE OF THE VILLAGE HEAD IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE OWNED ENTERPRISES (BUMDes) IN THE VILLAGE OF WONOSARI THE BENGKALIS SUB DISTRICT OF BENGKALIS

ABSTRACT

KHAIRUL FATHONI

Keywords : Role, Management, BUMDes

This study aims to find out how the Role of Village Heads in the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Wonosari Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. The assessment indicators used include Planning, Organizing, Mobilizing and Monitoring. This type of research is located in Wonosari Village, Bengkalis Subdistrict, Bengkalis Regency. This is a descriptive survey, which prioritizes questionnaires as a tool for collecting data and data collected with this tool and then becomes the main raw material for analyzing empirical conditions and objectivity of the research objectives in the location studied. The sample population in this study amounted to 32 people, namely those who became staff of BUMDes and the people of Wonosari Village. In this study the sampling was done by census technique and using the Slovin formula. For the census technique carried out on the Village Head and Staff of the Superior Sari BUMDes while the Slovin formula for the community. Meanwhile the techniques for analyzing data using the frequency measurement tool. Based on this data analysis technique researchers assessed the Role of Village Heads in the Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Wonosari Village, Bengkalis District, Bengkalis Regency. Being in the Less Acting interval this can be seen from the answers of 32 respondents from the three indicators that obtained a value of 66.48 based on the assessment items categorized as Less Role. Recommendations that need to be considered, especially with the management of BUMDes, are further enhanced and more assertive in carrying out supervision by requesting reports from the business unit, then more often disseminating information to the public about the existence of BUMDes so that the community can participate in advancing the BUMDes.

DAFTAR ISI

<u>KATA PENGANTAR</u>	Err
or! Bookmark not defined.	
<u>DAFTAR ISI</u>	v
<u>DAFTAR TABEL</u>	13i
<u>DAFTAR GAMBAR</u>	ix
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u>	x
<u>PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH</u>	xi
<u>ABSTRAK</u>	xii
<u>ABSTRACT</u>	xiii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian.....	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	11
A. Studi Kepustakaan.....	11
1. Pemerintahan.....	11
a. Pengertian Pemerintahan	11
b. Fungsi Pemerintahan.....	12
c. Tugas Pemerintahan	13
2. Konsep Peranan.....	14
a. Pengertian Peranan	14
b. Macam-macam Peranan dalam masyarakat	15
3. Desa.....	16
a. Pengertian Desa	16
b. Kewenangan Desa	17
4. Konsep Pengelolaan.....	18
a. Pengertian Pengelolaan	18
b. Fungsi Manajemen	19
5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).....	24
a. Pengertian BUMDes.....	24
b. Cara Pendirian BUMDesa	25
c. Tujuan BUMDesa.....	26
6. Penelitian Terdahulu	26
B. Kerangka Pikiran.....	27
C. Konsep Operasional Variabel.....	28
1. Konsep Operasional	28
D. Operasional Variabel.....	30
E. Teknik Pengukuran	31

BAB III : METODE PENELITIAN.....	32
A. Tipe penelitian.....	32
B. Lokasi Penelitian.....	32
C. Populasi dan Sampel	33
D. Teknik penarikan sampel	34
E. Jenis dan Sumber Data	35
F. Teknik pengumpulan Data	35
G. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	38
A. Profil Desa Wonosari	38
B. Sejarah Singkat Desa.....	38
C. Keadaan Penduduk.....	40
1. Jumlah Penduduk.....	40
2. Mata Pencaharian	41
3. Agama Dan Kepercayaan	43
D. Pendidikan.....	44
E. Sarana Prasarana dan Akuntabilitas	45
F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	46
G. Uraian Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	48
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Identitas Responden	51
1. Identitas Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
2. Identitas Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir	52
3. Identitas Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	53
B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari ..	54
1. Perencanaan (Planning)	54
2. Pengorganisasian (Organizing).....	58
3. Penggerakan (Actuating)	62
4. Pengawasan (Controlling)	66
5. Rekapitulasi Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari.....	70
C. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengelolaan BUMDes	71
BAB VI : PENUTUP.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR KEPUSTAKAAN	75
LAMPIRAN.....	77

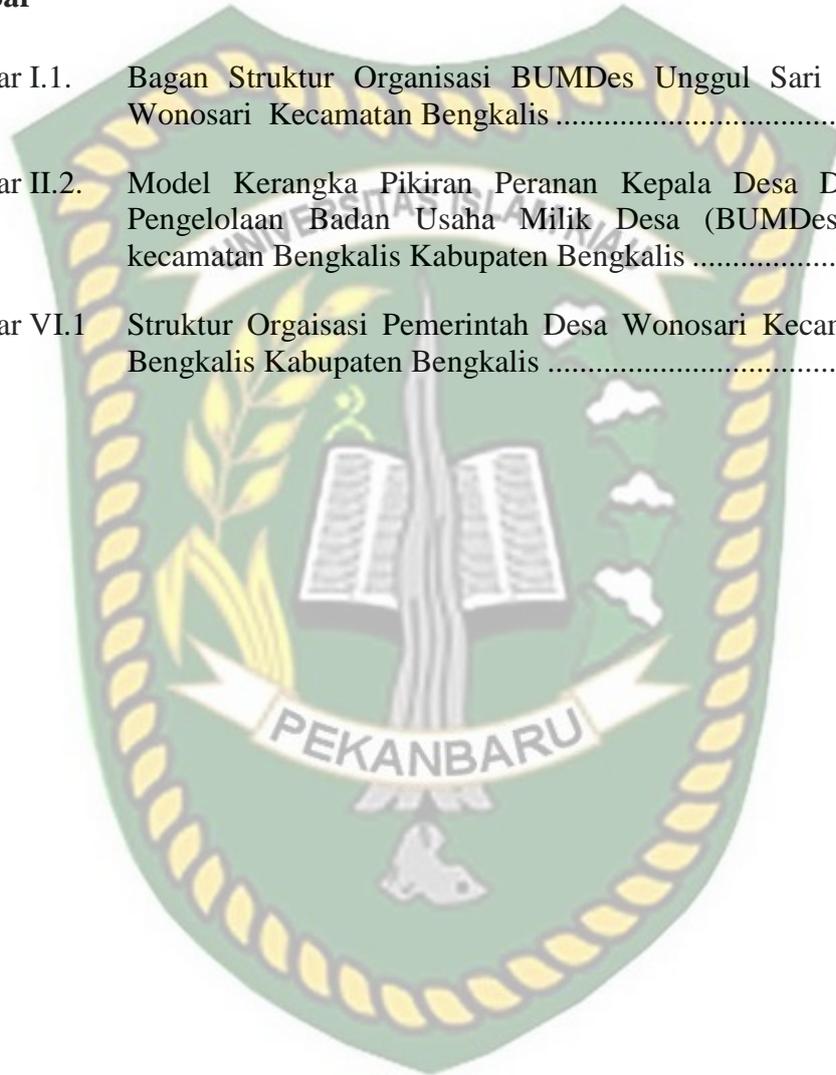
DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
Tabel I.1	Anggaran Modal BUMDesa Unggul Sari Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis	7
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu	26
Tabel II.2	Operasional Variabel Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan ..	30
Tabel III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	34
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis	40
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis	41
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kcamatan Bengkalis.. ..	42
Tabel IV.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama yang ada Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	43
Tabel IV.5	Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	44
Tabel IV.6	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	44
Tabel IV.7	Sarana Prasarana dan Akuntabilitas yang ada di Kantor Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.....	45
Tabel V.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel V.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir	52
Tabel V.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia	53
Tabel V.4	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden mengenai Indikator Perencanaan BUMDes Di Desa Wonosari 2018.....	55

Tabel V.5	Analisis Tanggapan Responden Staff BUMDes dan Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan Di Desa Wonosari 2018.....	57
Tabel V.6	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengorganisasian Di BUMDes Desa Wonosari 2018....	59
Tabel V.7	Analisis Tanggapan Responden Staff BUMDes dan Masyarakat Mengenai Indikator Pengorganisasian Di Desa Wonosari 2018.....	61
Tabel V.8	Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Penggerakan Di Desa Wonosari 2018.....	63
Tabel V.9	Analisis Tanggapan Responden Staff BUMDes dan Masyarakat Mengenai Indikator Penggerakan Di Desa Wonosari 2018.....	65
Tabel V.10	Distibusi Frekuensi Tanggapan Responden Mengenai Indikator Pengawasan Di BUMDes Desa Wonosari 2018.....	66
Tabel V.11	Analisis Tanggapan Responden Staff BUMDes dann Masyarakat mengenai Indikator Pengawasan Di Desa Wonosari 2018.....	69
Tabel V.12	Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis 2018	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
Gambar I.1.	Bagan Struktur Organisasi BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis	6
Gambar II.2.	Model Kerangka Pikiran Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	27
Gambar VI.1	Struktur Organisasi Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	47



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuisioner Untuk Staff BUMDes Desa Wonosari Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	80
2. Daftar Kuisioner Untuk Masyarakat Desa Wonosari Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	84
3. Daftar Wawancara Kepala Desa Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	88
4. Daftar Teli Jawaban Responden Penelitian Staff Bumdes Dan Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis	90
5. Dokumentasi Peneitian Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis	92
6. Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR No.37/UIR-Fs/Kpts/2018 Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi	95
7. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Perizinan Terpadu Provinsi Riau No 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/14865 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.....	96
8. Surat Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bengkalis No 070/BKBP/499/2018.....	97
9. Rekomendasi Penelitian Dari Kantor Camat Bengkalis Kabupaten Bengkalis No 300/Trantib/37	98
10.Surat Keterangan Penelitian Dari Kantor Pemerintah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis No 148/PEM/XI/2018	99

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip demokrasi konstitusional menegaskan tujuan negara berdasarkan UUD 1945 alinea 4 ialah : (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) memajukan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam proses mencapai tujuan dari Negara berdasarkan UUD 1945, perlunya otonomi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayananan, dan perlindungan bagi masyarakat. Otonomi daerah diberikan kewenangan yang lebih luas pada pemerintah daerah karena dapat berhubungan langsung dengan masyarakat.

Pemerintahan dimaknai sebagai suatu organisasi yang memiliki aktivitas dalam pemenuhan kebutuhan, hal ini seperti di ungkapkan oleh Ndraha :

Pemerintah merupakan suatu lembaga atau badan yang mempunyai fungsi untuk pemenuhan bagi kepentingan masyarakat. Kemudian pemerintahan merupakan suatu proses yang dilakukan untuk pemenuhan dan perlindungan bagi masyarakat bangsa Indonesia (Ndraha 2005;36).

Menurut Prof. Prajudi (dalam Inu Kencana, 2013;12) bahwa tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi

pemerintahan adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Selanjutnya Inu Kencana (2013;12) menjelaskan tentang pemerintahan berdasarkan Kitab Suci Alqur'an 3;104 Adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung.

Maka dari itu Pemerintahan adalah proses pemenuhan dan melindungi kebutuhan masyarakat, sehingga terpeliharanya keamanan dan ketertiban di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara wajar.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 pada ayat (43) pengertian Desa adalah sebagai berikut :

“desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan demikian, Desa sebagai level pemerintahan terendah yang berwenang mengurus pemerintahannya, yang bersentuhan dengan masyarakat, dengan tujuan untuk melindungi masyarakat bangsa Indonesia. Karena itu sebagai pemerintahan terendah perlu pengkoordinasian yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas agar dapat mencapai tujuan dari dibentuknya negara.

Pemerintah Desa merupakan lembaga yang bertugas untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat, dalam pemerintah desa terdapat Kepala Desa yang memegang kekuasaan tertinggi yang dibantu Perangkat desa

sebagai unsur penyelenggaraan Desa serta Badan Permusyawaratan Desa adalah selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga sebagai perwujudan demokrasi yang berfungsi mengontrol jalannya pemerintah desa secara efektif dan efisien.

Dalam rangka untuk meningkat kesejahteraan masyarakat Pemerintah membentuk lembaga yang ada di Desa yaitu BUMDes, Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga yang besar modalnya dimiliki oleh desa berasal dari kekayaan desa yang kemudian dikelola dengan baik agar dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa.

Kelembagaan seperti BUMDes yang disebutkan di atas telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa terdapat pada BAB X Badan Usaha Milik Desa. Sejalan dengan program Pemerintah dalam upaya meningkatkan ekonomi Desa melalui BUMDes maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa pada Pemerintah Kabupaten Bengkalis salah satunya ada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUM Desa.
- (2) Kepala Desa mewakili desa selaku pemilik modal BUM Desa.
- (3) Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa

Pasal 19

Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Desa.

Pasal 22

Komisaris Mempunyai Tugas :

- a. Memberikan nasehat kepada direktur dan kepala unit usaha dalam pengelolaan BUM Desa;
- b. Mengawasi, mengoordinasikan, dan menjadi penasehat operasional BUM Desa; dan
- c. Menyusun standar kinerja BUM Desa.

Pasal 23

Komisaris mempunyai wewenang :

- a. Meminta penjelasan dan keterangan dari direksi mengenai laporan kegiatan dan keuangan BUM Desa;
- b. Menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan pengawasan dan audit dan / atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- c. Memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa; dan
- d. Memberikan persetujuan terhadap penghapusan dari pembukuan dan hak tagih aset BUM Desa.

Berdasarkan peraturan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Unggul Sari Desa Wonosari.

Pasal 22

Direktur Bekewajiban :

- a. Mengelola dan mnengembangkan BUMDesa Unggul Sari agar menjadi lembaga yang mlayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayan umum masyarakat Desa;
- b. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
- c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya;
- d. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan BUM Desa Unggul Sari;
- e. Menyiapkan rencana kerja dan rencana bisnis kepada komisaris setiap tahun.
- f. Menyelenggarakan admnistrasi umum dan keuangan BUM Desa;
- g. Menetaokan susunan organisasi dan tata kerja BUM Desa dengan persetujuan Komisaris.
- h. Mewakili BUMDesa didalam maupun diluar pengadilan
- i. Menjadi negosiator dalam perundingan dengan pihak ketiga;
- j. Memberikan tugas kepada Kepala Unit Usaha;

k. Mengusulkan Unit Usaha Baru yang layak dikembangkan sesuai dengan Potensi Desa;

pasal 33

- (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c mewakili kepentingan masyarakat.
- (2) Susunan kepengurusan pengawas terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wwakil Ketua merangkap Anggota;
 - c. Sekretaris merangkap anggota;
 - d. Anggota
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menyelenggarakan Rapat umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (tahun) sekali
- (4) Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang menyelenggarakan rapat umum pengawas untuk :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
 - c. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja direktur
- (5) Masa bakti Pengawas diatur dan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa.

Kabupaten Bengkalis merupakan kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Bengkalis merupakan Kecamatan sekaligus Ibu Kota Kabupaten Bengkalis. Yang memiliki Luas Kecamatan 513,00 Km², Jumlah penduduk 72.961 Jiwa. Kecamatan Bengkalis memiliki 32 Desa.

Dalam buku Monografi Desa Wonosari, Desa Ini berada di pinggir Kota Bengkalis yang mempunyai Luas Wilayah 1.633 Ha. Desa Wonosari mempunyai jumlah penduduk 7.264 Jiwa atau 1.810 KK.

Desa Wonosari memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang bernama Unggul Sari, yang di bentuk pada tahun 2015 yang sudah berjalan 3 tahun, Bumdesa Unggul Sari berkedudukan di Desa Wonosari dan berkantor di Jl. HR.Soebrantas Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis yang bertujuan untuk

menambah pendapatan asli desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola BUMDes. Berikut ini Struktur Organisasi BUMDes Unggul Sari :

Gambar I.1. Bagan Struktur Organisasi BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis



Sumber : Pemerintah Desa Wonosari 2017

Berdasarkan Gambar I.1 diatas dapat dilihat Struktur Organisasi BUMDes Unggul Sari terdiri dari Komisaris Bapak Suswanto, Direktur Bapak H. Irman, Sekretaris Ibu Rizki Verdana, Ketua Pengawas Bapak Juli Triono, Bendahara Ibu Anisa, Anggota Pengawas Bapak Khairul Amri dan Ketua Unit Waserda & Jasa Bapak Budi Efriadi.

Bumdesa Wonosari dibentuk pada tahun 2015 berdasarkan hasil musyawarah desa dan diberi nama BUMDes Uggul Sari dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Unggul Sari Desa Wonosari. Jenis BUM Desa Unggul Sari berupa :

Pasal 7

- a. Usaha perdagangan dan atau pengadaan barang dan jasa di Desa (sesuai dengan kemampuan dan potensi yang ada)
- b. Pengelolaan bidang pertanian, perkebunan dan peternakan

c. Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED SP)

Modal BUMDes Unggul Sari berasal dari penyertaan Modal Dari dana Desa 50%, pihak ke 3 dari masyarakat dan bisa dari pengurus BUMDes itu sendiri, untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel anggaran modal BUMDes Unggul Sari berikut ini :

Tabel I.1 : Anggaran Modal BUMDesa Unggul Sari Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis

No	Tahun Anggaran	Jumlah Modal	Jenis Usaha
1	Tahun 2015	Rp. 20.000.000	Pertanian
2	Tahun 2017	RP. 50.000.000	WASERDA (TOKO)
3	Tahun 2018	Rp. 25.000.000	Agen tabung gas, penjualan produk kecil (serpan pagi), token listrik.

Sumber : Pemerintah Desa Wonosari 2018.

Dari tabel I.1 dapat diketahui BUMDes Unggul Sari memiliki modal anggaran tahun 2015 sebesar Rp.20.000.000 dengan usaha Pertanian, modal anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000 dengan usaha Waserda (toko sembako) dan modal anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 25.000.000 dengan usaha agen tabung gas, penjualan produk kecil (serapan pagi), token listrik.

Dalam perkembangannya BUMDes Unggul Sari masih menimbulkan berbagai masalah, salah satunya dibidang perdagangan. BUM Desa Unggul Sari memiliki Unit usaha dibidang perdagangan yang dinamakan Warung Serba Ada (WASERDA) dengan anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 50.000.000,00 yang menjual bahan sembako dan lain-lain, dalam pelaksanaannya Unit Waserda ini sering terlihat tutup yang menyebabkan ketidakefektifan unit usaha tersebut. Jika

Unit Waserda ini dikelola dengan baik maka akan menambah Pendapatan Asli Desa Wonosari.

Hal yang menyebabkan Unit Waserda ini sering tutup menurut Kepala Desa Wonosari Bapak Siswanto sebagai Komisaris BUMDesa Unggul Sari, (dalam wawancara pada hari Rabu Tanggal 07 November jam 09:00 Wib) mengatakan bahwa :

“waserda ini berjalan kurang lebih 6 bulan, yang menyebabkan tutupnya unit waserda tersebut adalah kurang tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat bahwasanya BUMDes ini sudah memiliki usaha, jadi memang masyarakat belum begitu antusias untuk memanfaatkan warung serba ada yang ada di BUMDes ini sehingga menyebabkan transaksi tidak begitu lancar dan adanya musyawarah untuk mengganti jenis usaha yang baru”

Dari uraian diatas, jelas terlihat begitu pentingnya tugas yang harus dilakukan oleh Kepala Desa sebagai Komisaris yang memegang kekuasaan tertinggi atas penyelenggaraan BUM Desa.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dilapangan maka ditemukan beberapa gejala atau fenomena yaitu :

1. Terindikasi kurangnya Kepala Desa sebagai Komisaris dalam memberikan Pengawasan kepada Direktur dan Kepala Unit Usaha dalam Pengelolaan BUM Desa.
2. Terindikasi kurangnya pengorganisasian yang baik oleh Kepala Desa dalam menentukan Direktur, dan Kepala Unit Usaha yang akan mengelola BUM Desa.
3. Terindikasi kurangnya Kepala Desa dalam menyusun standar kinerja BUM Desa.

Dari Fenomena diatas penting untuk diketahui peran Kepala Desa sebagai Komisariss dalam pengelolaan BUMDes agar dapat berjalan dengan Maksimal dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat desa dan pendapatan asli desa, maka karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan berjudul :

“Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis”.

B. Rumusan Masalah.

Melihat latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok bahasan peneliti adalah Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Untuk membahas penelitian ini lebih lanjut, maka peneliti merumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Di Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bengkalis masa priode 2014-2020?
2. Apa yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.
 - a. Mengetahui Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

- b. Mengetahui apa yang menjadi penghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Manfaat Teoritis, sebagai pengembangan Ilmu Pemerintahan yang diperoleh di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
- b. Manfaat Akademis, dapat dijadikan sebagai bahan informasi khususnya bagi peneliti yang membahas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
- c. Manfaat Praktis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi maupun menjadi perbandingan bagi peneliti yang membahas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep pada penelitian ini, penulis mengutip beberapa konsep dari para ahli dan teori yang sesuai pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penelitian untuk memecahkan permasalahan dan akan menjadi landasan dalam penelitian. Teori-teori yang digunakan akan dihubungkan pada permasalahan.

1. Pemerintahan.

a. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan dimaknai sebagai suatu organisasi yang memiliki aktivitas dalam pemenuhan melindungi masyarakat, hal ini seperti yang di ungkapkan oleh Ndraha :

Pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, sedangkan yang disebut dengan pemerintahan adalah proses pemenuhan kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat, pemerintahan atau badan organisasi yang memiliki tugas untuk memenuhi dan melindungi Bangsa Indonesia (Ndraha 2005;36).

Selanjutnya pengertian pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni arti sempit dan luas, seperti yang di ungkapkan oleh Bevir :

Pengertian Pemerintahan ke dalam dua pengertian yakni dalam arti sempit sebagai sebuah konstitusi (*government as an institution*), sedangkan dalam arti luas pemerintah diartikan sebagai sebuah proses (*government as a process*). Dalam konteks bahasa indonesia, dibedakan antara pemerintah sebagai sebuah institusi atau organ yang memerintah, sedangkan pemerintahan diartikan sebagai sebuah proses atau aktivitas memerintah. Bevir (dalam Sadu Wasistiono 2015;87)

Konsep pemerintahan menurut Rasyid (dalam Rahyunir rauf, 2015;28)

adalah :

“apa yang dilakukan pemerintah, selanjutnya pemerintahan memaknainya sebagai proses menegakkan dan memelihara keadilan, menjamin adanya perlakuan yang adil berdasarkan hukum kepada setiap pribadi warga negara, memberi pelayanan bagi kemajuan bersama. Sedangkan tugas pokok pemerintah dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*)”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pemerintahan merupakan proses menegakkan dan memelihara keadilan, dan berfungsi pemenuhan dalam pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan.

Disiplin Ilmu tertua adalah Ilmu Pemerintahan, seperti yang di ungkapkan oleh Bayu Suryaningrat :

Disiplin ilmu tertua adalah Ilmu Pemerintahan karena sudah dipelajari sejak sebelum Masehi oleh para filosof, yaitu Plato dan Aristoteles. Walaupun sering disebut-sebut bahwa ilmu tertua adalah filsafat, tetapi pada prinsipnya yang dibicarakan pertama adalah filsafat Pemerintahan. Hanya kemudian pemerintahan berkembang menjadi suatu seni, kemudian menjelang abad XX menjadi ilmu pengetahuan terapan, sebab dipergunakan metode ilmiah dalam mempelajari gejala pemerintahan. Pada dewasa ini pemerintahan berusaha keras untuk menjadi disiplin ilmu pengetahuan murni yang berdiri sendiri. (dalam Inu Kencana, 2013;34)

Selanjutnya menurut Prof. DR. H. A. Brasz (dalam Inu Kencana, 2013;35)

Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan di fungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

b. Fungsi Pemerintahan

Dalam pelaksanaan pemerintahan, Rasyid mengemukakan bahwa fungsi pokok pemerintahan menjadi 3 pokok yaitu :

Pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. (Rasyid, 1997:13)

Selanjutnya menurut Prof. Prajudi (dalam Inu Kencana, 2013:12) bahwa tugas pemerintah adalah antara lain tata usaha negara, rumah tangga negara, pemerintahan, pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Sedangkan fungsi pemerintahan adalah pengaturan, pembinaan masyarakat, kepolisian dan peradilan.

Menurut Soewargono dan Johan (dalam Muhadam, 2013:38) mengemukakan fungsi dari pemerintah adalah lembaga yang membuat kebijakan.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi pemerintahan yaitu memberikan pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, pengaturan, pembinaan masyarakat, peradilan dan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

c. Tugas Pemerintahan

Pemerintah juga merupakan kegiatan lembaga-lembaga politik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintahan di sebut pemerintah. Tugas pokok pemerintahan menurut Rasyid (1997:13) antara lain :

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak menjadi pemberontakan didalam yang dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya keributan diantara warga, masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai.

3. Peraturan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatarbelakangi secara damai.
4. Melakukan pelayanan umum dengan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat lain.
7. Menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

2. Konsep Peranan.

a. Pengertian Peranan

Setiap manusia dalam kehidupannya masing-masing memiliki peran dan fungsi dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Dalam melaksanakan perannya, setiap manusia memiliki cara atau sikap yang berbeda-beda. Makna dari kata peran adalah suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial.

Peranan menurut Soekanto (dalam Rahyunir Rauf 2003;243) adalah :

“Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedua-duanya tak dapat dipisah-pisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat dan kesempatan-kesempatan apa yang di berikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan kepada orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur oleh norma-norma yang berlaku. Peranan dapat dijelaskan bahwa “suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang

teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Selanjutnya menurut Thoha (dalam Soerjono, 2001:268) “dalam bahasa organisasi peranan diperoleh dari uraian jabatan. Uraian jabatan itu merupakan dokumen tertulis yang memuat persyaratan-persyaratan dan tanggung jawab atas suatu pekerjaan.

Menurut Siagian (2001;148) mengemukakan peranan Pemerintah dalam pembangunan adalah sebagai berikut :

- i. Sebagai stabilisator
- ii. Sebagai inovator
- iii. Sebagai pelopor

Sedangkan menurut Soekanto (dalam Rahyunir Rauf,2003;243) kata Peran mencakup sedikitnya tiga hal, yaitu :

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

b. macam-macam peranan dalam masyarakat.

Soekanto (dalam Rahyunir Rauf 2003;246) bahwa pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu dalam masyarakat penting untuk hal-hal berikut :

1. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan, apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

2. Peranan tersebut seyogyanya dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya, maka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai hasrat melaksanakannya.
3. Dalam masyarakat kadang kala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, karena memerlukan pengorbanan kepentingan-kepentingan pribadi terlalu banyak
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, maka belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

3. Desa.

a. Pengertian Desa

Desa sebagai bagian dari pemerintahan terendah yang berada dibawah Kabupaten/Kota. Desa menurut Unang Soenardjo (dalam Hanif Nurcholis, 2011;4) :

“Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Pengertian Desa berdasarkan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang

Desa :

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat. Hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan desa merupakan masyarakat yang mempunyai kewenangan dalam mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Menurut Soemantri (2011;7) pemerintah Desa yaitu terdiri dari Kepala desa yang memegang kekuasaan tertinggi dan dibantu oleh perangkat desa, perangkat desa ini terdiri dari sekretaris dan perangkat lainnya. sekretaris desa dalam pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan yang jumlahnya di sesuaikan dengan kebutuhan di desa tersebut.

Selanjutnya pemerintah Desa dimaknai sebagai pemerintah terendah yang berada di kabupaten/kota. desa yang memiliki kewenangan mengurus kepentingan masyarakatnya, seperti yang di ungkapkan oleh Widjaja :

Pemerintah Desa diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari system penyelenggara pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, Kepala desa bertanggung jawab Kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati (dalam Widjaja (2003;3)

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara pemerintah terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang bertugas mengatur kepentingan dari masyarakat.

b. Kewenangan Desa.

Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 06 tahun 2014 desa memiliki kewenangan antara lain :

- a. Kewenangan lokal berskala desa
- b. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- c. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Konsep Pengelolaan.

a. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan dalam istilah inggris yaitu management yang kemudian dalam bahasa indonesia disebut menjadi manajemen yang berarti mengatur, yang berfungsi agar dapat tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Drs. M. Manulang (1990:16) Pengelolaan (manajemen) mengandung tiga pengertian yaitu : Pertama, manajemen sebagai suatu proses, Kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen dan yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni (suatu art) dan sebagai suatu ilmu.

Menurut Munir (2004;8) Pengelolaan merupakan satu langkah yang harus dilakukan oleh suatu organisasi dalam menjalankan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya konsep pengelolaan berkaitan erat dalam konsep manajemen dimana menurut Menurut Ordway Tead (dalam Inu Kencana, 2013;126) pengertian manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seperti memberi arahan dan bimbingan agar sesuai dengan yang sudah direncanakan.

Menurut George R. Terry (1990;9) manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dua orang atau secara berkelompok dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah kegiatan yang dilakukan bersama dalam rangka untuk mencapai tujuan.

Manajemen Pemerintahan menurut Budi Supriyanto (2009:24), adalah suatu proses kegiatan melakukan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Selanjutnya menurut Suryadinata (dalam Budi Supriyanto, 2009:24) manajemen pemerintahan merupakan “suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Inti manajemen pemerintahan terletak pada proses penggerakan untuk mencapai tujuan negara, dimana terkait erat apa yang kita kenal dengan fungsi kepamongprajaan”.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen pemerintahan adalah tata kelola pemerintahan oleh penguasa dalam rangka mewujudkan tujuan secara bersama-sama.

b. Fungsi-fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen tersebut diposisikan sebagai bagian atau tercakup dalam salah satu fungsi manajemen yang dikonsepsikan oleh George R.Terry, :

1. Fungsi Perencanaan (Planning)
2. Fungsi Pengorganisasian (organizing)
3. Fungsi Penggerakkan (actuating)
4. Fungsi Pengawasan (controlling)

Pada fungsi perencanaan tercakup fungsi pengambilan keputusan (*decision making*) dan fungsi penganggaran (*budgeting*). Dalam fungsi pengorganisasian meliputi fungsi penunjukan staf (*staffing*), fungsi pelatihan (*training*), dan fungsi

pengkoordinasian (*coordinating*). Sementara fungsi penggerakkan melingkupi fungsi tugas pemberian motivasi (*motivating*), fungsi pengarahan (*directing*), dan fungsi memimpin (*leading*). Sedangkan fungsi pengawasan terdiri dari fungsi pelaporan (*reporting*), fungsi penilaian (*evaluating*), fungsi penyempurnaan (*correcting*), dan fungsi pengendalian (*reaning*).

Berdasarkan fungsi manajemen yang dikonsepsikan George R. Terry yang dijabarkan sebagai berikut :

1. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dapat dartikan sebagai suatu kegiatan apa yang harus dipersiapkan dan cara dalam melaksanakan suatu kegiatan agar dapat tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Seperti ditulis oleh Louis A. Allen (dalam Zulkifli, 2009;54) mengungkapkan pengertian dari perencanaan adalah menentukan segala rangkaian dari tindakan yang akan dilakukan guna dapat mencapai suatu hasil yang sesuai.

Selanjutnya Menurut The Liang Gie (dalam Zulkifli, 2009;54) yang mendefinisikan perencanaan sebagai suatu kegiatan yang ditentukan sebelumnya apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya.

Newman (Zulkifli, 2015;63) pengertian Perencanaan merupakan kegiatan dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan apa (*what*),siapa (*who*), kapan (*when*), dimana (*where*), mengapa *why*, bagaimana (*how*).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan adalah kegiatan dalam penentuan kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai hasil sesuai seperti yang diinginkan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia merupakan unsur terpenting melalui pengorganisasian manusia dapat didalam tugas-tugas yang saling berhubungan. (dalam George R. Terry, 1990;73)

Selanjutnya menurut Siagian (dalam Zulkifli 2009;78) Organisasi merupakan kegiatan yang dilakukan dua orang atau berkelompok yang didalamnya terdapat yang disebut atasan dan bawahan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan dua orang atau berkelompok dalam mencapai kegiatan sesuai yang telah ditentukan sebelumnya.

Unsur-unsur dasar pengorganisasian terdiri dari :

1. Pengelompokan dari tugas yang akan dilakukan guna mencapai tujuan yang telah didefinisikan.
2. Sejumlah tugas tersebut dijadikan ke dalam beberapa fungsi departemen, bidang, divisi, cabang, seksi, unit, dan atau sub unit.
3. Penunjukkan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab kepada beberapa orang manager pada setiap departemen tersebut.
4. Menyusun struktur organisasi sebagai panduan garis komando dan pertanggung jawaban bagi personil pada setiap level manajemen organisasi.
5. Melakukan koordinasi baik secara horizontal maupun vertikal dalam rangka menyatukan gerak dan langkah mencapai tujuan organisasi.
6. Mengakaji kegiatan manajemen (span of management) atau pun kegiatan pengawasan (span of control) sebagai pertimbangan efektifitas pelaksanaan tugas-tugas.

3. Penggerakkan (*actuating*)

Menunjukkan bahwa hasil dari utama dari pelaksanaan fungsi pengorganisasian itu disamping struktur organisasi adalah rumusan tertulis seperangkat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap pimpinan struktural atau manajer serta setiap individu personil organisasi. Sejumlah hal yang di ikhtiarkan itu secara teroris tercakup dalam fungsi pergerakan (*actuating*)

Menurut Zulkifli (2009;113) pergerakan bermakna menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat persuasif maupun mobilitatif yang bertujuan kepada menjadikan personil organisasi mau secara tidak terpaksa atas dasar kesadaran pribadi melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap butir dari tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang telah dideligsasikan kepadanya.

4. Pengawasan (*controlling*)

Menurut Siagian (dalam Yusri Munaf, 2016;100) mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya.

Menurut George R. Tery (dalam Yusri Munaf 2016;99) menyampaikan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya pengawasan tidak terlepas dari apa yang diawasi, seperti yang diungkapkan oleh Yusri Munaf :

Membahas pengawasan maka tidak terlepas dari apa yang diawasi dan siapa yang menjadi pengawas dari objek pengawasan tersebut. Objek pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan. Dalam (Yusri Munaf 2016;99)

Dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian Pengawasan sebagai suatu kegiatan pengamatan terhadap pelaksanaan organisasi agar semua pekerjaan dapat sesuai dengan rencana.

Dengan adanya kegiatan dalam pengawasan dapat dilihat seberapa banyak kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dan dapat mengetahui apa yang menjadi penghambat dari proses dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian dari kegiatan pengawasan dapat menjadi perbandingan dari kegiatan yang sudah dilakukan dan apa yang adakn dilakukan.

Berdasarkan pendekatan obyek dan subyek dari pengawasan itu sendiri, terdapat cukup banyak alternatif teknik pengawasan yang sudah teruji kebenarannya yang dapat dpilih dan dilaksanakan. Di antaranya seperti yang deskrisikan oleh Siagian (dalam zulkifli, 2009;149). Bliau menjelaskan bahwa secara empirik terdapat empat teknik pengawasan yang dapat dan layak untuk dipergunakan yaitu :

1. pengawasan langsung atau observasi, dimana pihak manajemen melihat sendiri bagaimana caranya para petugas operasional menyelenggarakan kegiatan dan menyelesaikan tugasnya. Kelebihan teknik ini adalah : memperoleh informasi *on the spot* tentang jalannya kegiatan operasional; dapat diluruskan secara langsung setiap kesalahan yang ditemukan; para bawahan merasa diperhatikan secara langsung oleh pimpinannya. Kelemahan adalah pelaksanaannya relatif dapat menyita banyak waktu pimpinan.

2. Pengawasan melalui laporan baik berbentuk lisan maupun tertulis. Pihak manajemen organisasi memeriksa perkembangan pelaksanaan tugas-tugas operasional yang dilaksanakan oleh karyawan melalui orang yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan baik secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya. Aspek positif teknik ini disamping dinilai lebih ekonomis juga dapat memperoleh informasi negatif dari kegiatan operasional yang segera ditangani.
3. Pengawasan melalui kuisisioner. Suatu upaya untuk mengetahui informasi data sejauh mana tingkat pencapaian hasil dari pelaksanaan tugas-tugas operasional oleh para karyawan, dengan jalan meminta setiap karyawan terkait untuk menjawab (daftar pertanyaan) atau kasus tertentu.
4. Pengawasan melalui teknik wawancara. Apabila diperlukan teknik ini dilaksanakan untuk memperoleh informasi pelaksanaan tugas-tugas operasional.

5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

a. Pengertian BUMDES

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menurut Theresia (2008) dalam Alfian Noer Ilham, merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan membangun kereketan masyarakat sosial masyarakat yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Jadi BUMDes adalah suatu lembaga usaha yang artinya memiliki fungsi untuk melakukan usaha dalam rangka mendapatkan suatu hasil seperti keuntungan atau laba.

Bentuk dari keberadaan BUMDes ini semakin diperjelas pada masa berlakunya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, dapat terlihat pada pasal 213, yang berbunyi:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.
2. Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan pinjaman sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Selanjutnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Desa yang baru yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka keberadaan dari suatu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tetap dipertahankan, karena telah dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat Desa yang telah mendirikan BUMDesa. Hal ini dapat terlihat pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi;

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong royongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/ atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Cara Pendirian BUMDesa.

Proses dan prosedur dari pendirian BUMDesa Pada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 6

Pembentukan BUM Desa dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUM Desa Kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk;
- b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUM Desa.
- c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang pembentukan BUM Desa berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD;
- d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART Berdasarkan Berita Acara Hasil sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa Berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana pada huruf d; dan

- f. Pemerintah Desa berdasarkan peraturan Desa tentang pembentukan BUM Desa memproses pembentukan badan hukum Badan Usaha Milik Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

c. Tujuan BUMDesa.

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka kegiatan menampung kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan menambah pendapatan Asli Desa

Pendirian BUM Desa bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa;
- b. Mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomis masyarakat desa;
- c. Meningkatkan jiwa kewirusahaan masyarakat desa;
- d. Meningkatkan pendapatan desa

6. Penelitian Terdahulu

Tabel II. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andi Saputra	Peranan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.	Sama-sama meneliti masalah Badan Usaha Milik Desa.	1.Tahun 2015 2.Metode Kualitatif 3.teknik pengukuran: Terlaksana, cukup terlaksana, tidak Terlaksana
2	Angger Sekar Manikam	Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa di Desa Beringin Kecamatan Bandar Sekijang Kabupaten Pelalawan.	Sama-sama menggunakan Teknik pengukuran berperan, cukup berperan, dan kurang berperan.	1.Tahun 2013. 2. metode: Kualitatif. 3.Lokasi: di Desa Simpang Beringin

Sumber: Modifikasi penulis, 2018

Perbedaan antara peneliti dengan Andi Saputra, Peneliti menggunakan metode Kuantitatif, dan menggunakan teknik pengukuran Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan

Perbedaan antara peneliti dengan Angger Sekar Manikam, peneliti menggunakan Metode Kuantitatif, dan Teknik pengukuran peneliti yaitu Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan.

B. Kerangka Pikiran.

Gambar: II.2. Model Kerangka Pikiran Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.



Sumber : Modifikasi Penulisan Tahun 2018.

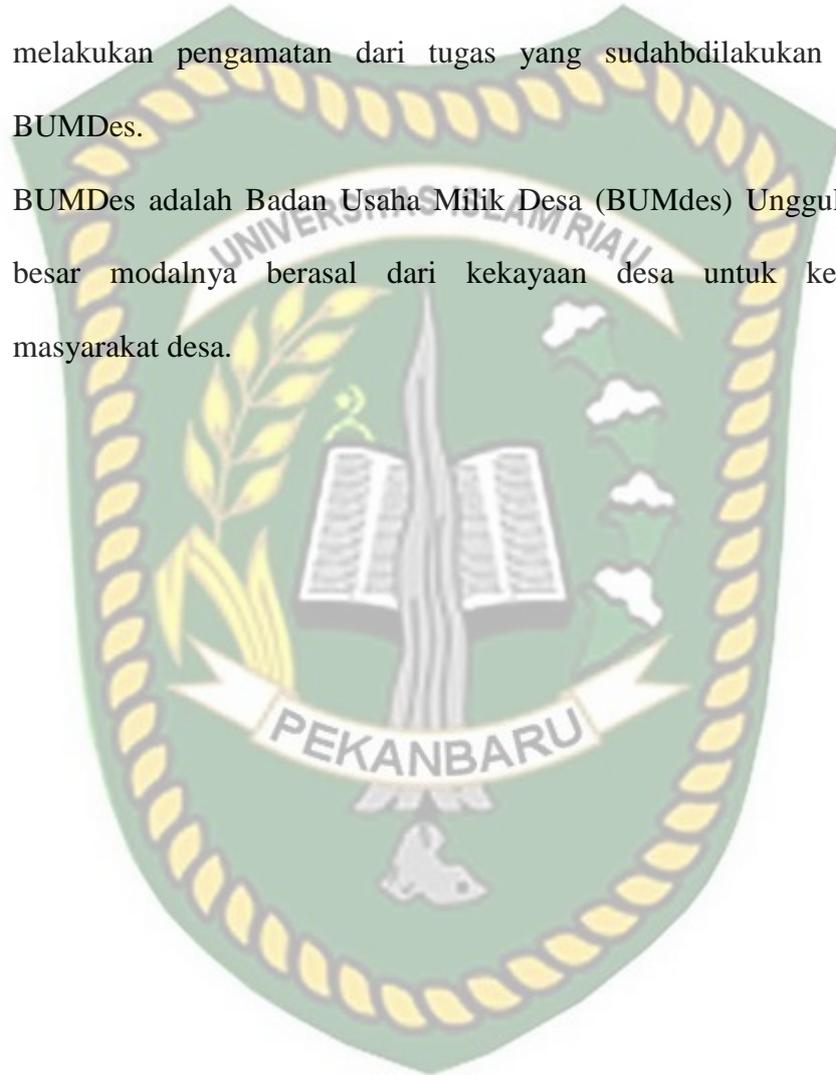
C. Konsep Operasional Variabel

1. Konsep Operasional

Dalam menciptakan penafsiran yang sama terhadap konsep dari beberapa ahli, penulis menjelaskan pengertian dari konsep yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut ini :

1. Pemerintah merupakan proses pemenuhan yang menjadi kebutuhan masyarakat, pemerintahan atau lembaga yang memiliki tugas dari kegiatan pemenuhan dan perlindungan bagi rayat Indonesia
2. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang terdiri dari Kepala Desa dan perangkat yang menyelenggarakan pemerintahan desa, yang berwenang untuk mengatur urusan dan kepentingan dari masyarakatnya.
3. Peranan adalah Kepala Desa yang melaksanakan hak dan kewajibannya yang seusai dengan kedudukannya sebagai Komisaris.
4. Pengelolaan adalah kegiatan Kepala Desa Sebagai Komisaris dengan menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.
5. Perencanaan adalah sebagai suatu kegiatan yang dilakukan Komisaris dalam menetapkan apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya dalam mencapai tujuan.
6. Pengorganisasian merupakan kegiatan yang dilakukan Komisaris untuk mengatur seluruh sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan BUMDes agar efektif.

7. Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan Komisaris dengan memberikan arahan maupun motivasi kepada staff BUMDes.
8. Pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan Komisaris dengan melakukan pengamatan dari tugas yang sudah dilakukan oleh staff BUMDes.
9. BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Unggul Sari yang besar modalnya berasal dari kekayaan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa.



D. Operasional Variabel

Tabel II.2 Operasional Variabel Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Konsep	Variabel	Indikator	Indikator Dinilai	Skala
1	2	3	4	5
Manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain. (George R. Terry)	Peranan Kepala Desa dalam pengelolaan BUMDes.	1. Perencanaan (planning)	a. Menyusun standar kinerja b. Memberikan persetujuan tata kerja c. Adanya Pertemuan, Diskusi dan Musyawarah	Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		2. Pengorganisasian (organizing)	a. Mengoordinasi Direksi b. Melindungi BUM Desa c. Memberikan persetujuan susunan organisasi	Berperan Kurang Berperan Tidak Berperan
		3. Penggerakkan (actuating)	a. Memberikan Nasehat b. Memberikan Sosialisasi c. adanya Pemberian Dorongan	Berperan Kurang berperan Tidak Berperan
		4. Pengawasan (controlling)	a. Pengawasan Langsung b. Pengawasan melalui laporan c. Pengawasan melalui kuisisioner d. Pengawasan melalui wawancara	Berperan Kurang berperan Tidak Berperan

Sumber : Data Olahan Peneliti 2018

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penilaian terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dibagi dalam tiga tingkatan atau variasi, adapun penilaian tersebut adalah : Berperan, Kurang Berperan, Tidak Berperan. Untuk melihat hasil peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wonosari maka dibuatkan pengukuran variabel sebagai berikut :

- Berperan** : Apabila Seluruh indikator dalam penelitian Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori Berperan 67%-100%
- Kurang Berperan** : Apabila seluruh indikator dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori Kurang Berperan 34%-66%
- Tidak Berperan** : Apabila seluruh indikator dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis telah menjalankan indikator yang ada atau jawaban responden pada kategori Tidak Berperan 0% - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

F. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah menggunakan tipe penelitian deskriptif, Menurut Sugiyono (2014:174) menyatakan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Yang dilaksanakan dengan cara survey, yaitu mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, misalnya dengan mengedarkan kuisisioner, wawancara, dan sebagainya.

Selanjutnya menggunakan metode penelitian campuran antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif adalah penelitian yang menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan datanya, penafsiran terhadap data tersebut serta penampilan dan hasilnya. Sugiyono (2014:174). Sedangkan kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

G. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. Dasar pertimbangan yang dipilihnya Desa Wonosari sebagai tempat lokasi penelitian adalah : (a) karena terindikasi kurangnya

pengelolaan terhadap BUMDes Unggul Sari desa Wonosari (b) terindikasi kurangnya pengawasan yang diberikan kepala desa sebagai komisaris dalam pengelolaan BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari (c) karena BUMDes Unggul Sari desa Wonosari ini sudah berdiri kurang lebih 3 tahun tetapi dalam pelaksanaannya belum tercapainya tujuan dari pembentukan BUMDes.

H. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2014:215) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sugiyono (2014:215) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang di ambil dari populasi harus betul-betul representative atau mewakili. .

Populasi dalam penelitian ini adalah Komisaris, Direktur BUM Desa, Sekretaris BUM Desa, Pengawas BUM Desa, Bendahara BUM Desa, Ketua Unit Usaha, Pegawai BUM Desa, dan Masyarakat.

Untuk lebih memperjelas dari besarnya sampel yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.1 Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Desa	1	1
2	Direktur BUM Desa	1	1
3	Sekretaris BUM Desa	1	1
4	Bendahara BUM Desa	1	1
5	Pengawas BUM Desa	2	2
6	Ketua Unit	1	1
7	Masyarakat	1810	25
	Total	1817	32

Sumber: Data Olahan Penulis, 2018

I. Teknik penarikan sampel

Teknik Penarikan Sampel dalam penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Untuk Kepala Desa, Direktur BUM Desa, Pengawas BUM Desa, Staf BUM Desa, Ketua Unit BUM Desa, Penulis menetapkan dengan menggunakan menggunakan cara sensus. Dengan alasan jumlah tersebut memungkinkan untuk diambil keseluruhan dan berada dilokasi yang berdekatan.

Selanjutnya untuk jumlah sampel masyarakat, peneliti menggunakan rumus Slovin yaitu :

$$n = N / (1 + N.(e)^2)$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Total Populasi

e = Batas Toleransi Kesalahan (error tolerance)

$$n = N / (1 + N e^2) = 1810 / (1 + 1810 \times 0,2)^2 = 24,65 \approx 25$$

Dengan demikian jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 25 jiwa.

J. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer: adalah data yang didapat dari responden melalui kuisisioner, wawancara, dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan reponden tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonosari tersebut.
2. Data Skunder
Merupakan data-data dari pihak kedua yang relevan yang dapat menunjang objek dari penelitian, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
 - c. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.
 - f. Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Unggul Sari Desa Wonosari
 - g. Data Monografi Desa Wonosari Tahun 2016.

K. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dan bersumber dari hasil observasi langsung di Desa Wonosari.

1. Kuisisioner (Daftar Pertanyaan), yaitu metode pengumpulan data yang menggunakan instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan yang di susun sesuai dengan permasalahan yang diteliti untuk kemudian

diajukan kepada para responden dengan mendatangi tempat kerja atau kediamannya.

2. Interview (wawancara), pengumpulan data yang didapatkan melalui wawancara reponden yang berhubungan dari permasalahan yang akan diteliti untuk memperjelas hasil kuisisioner yang telah diperoleh. Penulis memanfaatkan waktu yang tidak formil untuk melakukan wawancara dengan Kepala Desa, Direktur BUM Desa, Kepala Unit Usaha BUM Desa.
3. Observasi (Pengamatan Langsung) yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk lebih mengetahui Peranan yang dilakukan Komisaris BUMDes Unggul Sari.
4. Dokumentasi, yaitu teknik proses pengumpulan data atau arsip dan mengambil gambar-gambar dari dokumen yang terdapat ditempat penelitian yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini.

L. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dengan metode kuantitatif secara deksriptif, yaitu analisa yang memberikan gambaran yang sesuai dengan fakta dilapangan. Kemudian dianalisa selanjutnya diambil kesimpulan. Menurut Usman (2011:130) menyatakan penelitian kuantitatif secara deskriptif yaitu berupa angka kemudian digambarkan dalam bentuk statistik deskriptif, antara lain berupa skala pengukran, hubungan grafis, potrayais, variabilitas, dan sentral tendensi. Sedangkan menurut Ardianto (2011:48) penelitian kuantitatif secara deskriptif merupakan pemberian gambaran deskriptif dari variabel yang diteliti.

Selanjutnya peneliti menggunakan teknik Skala Likert dalam Pengukuran atas jawaban dari pernyataan yang telah diajukan kepada responden penelitian dengan cara memberikan skor pada setiap item jawaban. Menurut Sugiyono (2014;132) bahwa skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jawabanam setiap instrumen yang digunakan skala likert mempunyai gradasi yang positif sampai negatif.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Yang menjadi lokasi penelitian skripsi yang berjudul “Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis” adalah Desa Wonosari yang mana wilayahnya terletak pada Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau.

A. Profil Desa Wonosari

Desa Wonosari berada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dengan mempunyai batasan wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan : Desa Jangkang Kec. Bantan
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan : Desa Kelapapati Kelurahan
Damon Kelurahan Bengkalis
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan : Desa Pedekik
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan : Desa Senggoro

Desa Wonosari berjarak 1 Km 10 Menit dari Kota Kecamatan/ Kantor Camat, jarak Ibu Kota Kabupaten 1 Km 10 Menit dan jarak dari Ibu Kota Provinsi 4 Jam. Luas Wilayah Desa Wonosari adalah 1.633 Ha.

B. Sejarah singkat Desa Wonosari Bengkalis

Nama Desa Wonosari berasal dari kata wono dan sari, wono berarti hutan sedangkan Sari berarti pusat atau inti. Desa Wonosari dahulunya adalah pusat atau inti hutan yang berada di kecamatan Bengkalis. Maka sekitar tahun 1920

dibukalah hutan ini oleh pendatang yang berasal dari daerah Jawa, di antaranya Masroes, Tono Rejo, H. Saleh, Ustad Sukir, Atmo Saputro, Kiyai Minhad, Sariman, Manan, Tarmizi, Mubin, Salamun, dipimpin kepala kampung bernama Masroes

Seiring perkembangan penduduk maka pada tahun 2011 dusun di Desa Wonosari dimekarkan menjadi 5 Dusun yaitu :

1. Dusun Timur Sari, meliputi RW.01 yang dipimpin oleh Mawardi
2. Dusun Tanjung Sari, meliputi RW. 02 yang dipimpin oleh Massugianto
3. Dusun Mekar Sari, meliputi RW.03 yang dipimpin oleh Darman.
4. Dusun Mukti Sari, meliputi RW.04 yang dipimpin oleh M. Nasir
5. Dusun Antar Sari, meliputi RW.05 yang dipimpin oleh Anuar.

Urutan Kepala Desa Wonosari dari Tahun 1946 hingga sekarang adalah sebagai berikut :

- 1946 - 1949 Masroes (Kepala Desa)
- 1950 - 1965- Mad Damin (Kepala Desa) - Wongsorejo (Sekretaris Desa)
- 1966 - 1969- Atmo (Kepala Desa) - Nurdin/Samsuri (Sekretaris Desa)
- 1969 - 1974- Mubin (Kepala Desa) - Kamsari (Sekretaris Desa)
- 1974 - 1978- Mansyur Akhmad (Kepala Desa) - Kamsari (Sekretaris Desa)
- 1978 - 1986- Mochdir (Kepala Desa) - Kamsari (Sekretaris Desa)
- 1986 - 1995- Samiun (Kepala Desa) - Suwardi (Sekretaris Desa)
- 1995 - 2001- Syahril (Kepala Desa) - Ruslan (Sekretaris Desa)
- 2002 - 2013- Ruslan (Kepala Desa) – Ida Royani (Sekretaris Desa)
- 2014 – Sekarang – Suswanto (Kepala Desa) Wahyu Tri Cahyadi, Amd (Sekretaris Desa)

C. Keadaan Penduduk

a. Jumlah Penduduk

Secara administrasi Desa Wonosari terdiri dari 5 Kadus, 5 RW, 20 RT, yang menempati luas areal 1.633 Ha, dengan jumlah penduduk 7.264 Jiwa dan 1.810 KK. Penduduk Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdiri dari bermacam-macam suku antara lain Jawa, Melayu, China, Batak, Bugis, Minang, Suku Asli dan suku-suku lainnya yang sudah menjadi anggota penduduk Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Dibawah ini akan dipaparkan jumlah penduduk Desa Wonosari yang dijelaskan tabel berikut ini.

Tabel IV.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)
1	Laki-laki	3.907
2	Perempuan	3.357
	Jumlah	7.264

Sumber : Data Penelitian 2018

Dari data pada tabel IV.1 diatas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis, yaitu jenis kelamin Laki-laki 3.907 jiwa sedangkan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan 3.357 jiwa.

Penduduk di Desa Wonosari juga terdiri dari bermacam-macam suku. lebih jelasnya penulis paparkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Nama Suku	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Melayu	1.565
2	Jawa	3.348
3	China	246
4	Batak	334
5	Bugis	215
6	Minang	743
7	Suku Asli	52
8	Lainnya	761
Total		7.264

Sumber : Data Penelitian 2018

Dari tabel IV.2 diketahui bahwa jumlah total penduduk sebesar 7.264 orang. Berdasarkan suku yang ada di Desa Wonosari, total penduduk suku melayu lebih besar dari pada total penduduk suku lainnya, itu dikarenakan suku melayu memang mendominasi di pulau Bengkalis dan suku asli di pulau Bengkalis. Sedangkan sebagian dari suku-suku lainnya merupakan suku-suku pendatang (transmigrasi).

b. Mata Pencaharian

Mata Pencaharian di wilayah Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis beraneka ragam dan kompleks, tetapi lebih menonjol adalah sebagai karyawan swasta. Lebih jelasnya dipaparkan pada tabel berikut ini :

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian Masyarakat Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

No	Mata Pencaharian	Jumlah Penduduk (Orang)
1	Petani	270
2	Pedagang	402
3	Peternak	43
4	Pengrajin	141
5	Pegawai Negeri Sipil	470
6	Karyawan Swasta	2.124
7	Nelayan	5
8	Buruh	34
9	Masa pengangkutan (ojek, becak, dll)	1.508
	Jumlah	3.489

Sumber : Data Penelitian, 2018

Pada tabel IV.3 dilihat bahwa mata pencaharian Desa Wonosari yang beraneka ragam, tetapi lebih menonjol yaitu sebagai karyawan swasta berjumlah 2.124 orang dan masa pengangkutan (ojek, becak dll) sebanyak 1.508 orang. Petani sebanyak 270 orang, adapun petani disini meliputi petani karet dan petani sayuran atau musiman. Pedagang sebanyak 402 orang adapun pedagang disini, adalah pedagang sembako, sayur-mayur yang dibawa ke pasar. Pengrajin sebanyak 141 orang. Pegawai Negeri Sipil sebanyak 470 orang, adapun Pegawai Negeri Sipil disini meliputi, Pegawai dinas, guru, Polisi, TNI. Peternak sebanyak 43 orang yaitu meliputi peternakan ayam, sapi maupun kambing. Nelayan sebanyak 5 orang. Buruh sebanyak 34 orang, adapun buruh disini sebagai buruh bangunan.

Dengan demikian Pemerintah Desa harus lebih dapat meningkatkan fungsi Anggaran Alokasi Dana Desa secara tepat guna pada sasaran yang sesuai dengan kepentingan masyarakat Desa Wonosari. Demi meningkatkan kesejahteraan

masyarakat dari sektor usaha kecil dan menengah, dan maupun dari sektor lainnya.

c. Agama dan Kepercayaan

Agama dan kepercayaan Sesuai dengan dasar Negara, yaitu Pancasila pada pasal pertama ketuhanan yang maha esa. Untuk itu perlunya pembangunan sarana ibadah prasarana ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. masyarakat Desa Wonosari sebagian besar penduduk memeluk agama Islam, dan sebagian yang lain memeluk agama Kristen dan agama Budha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Jumlah penduduk menurut Penganut Agama yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

No.	Agama	Jumlah Penganut	Tahun
1	Islam	6.591	2018
2	Khatolik	-	2018
3	Protestan	237	2018
4	Hindu	-	2018
5	Budha	436	2018
6	Lainnya/Konghucu	-	2018
	Jumlah	7.264	2018

Sumber : Data Penelitian, 2018

Dari data pada tabel IV.4 diatas, mayoritas penduduk di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis beragama Islam, dengan jumlah 6.591 orang, dan disusul dengan pemeluk agama Budha 436 orang dan pemeluk agama Protestan berjumlah 237 orang.

D. Pendidikan

Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis terdapat 2 TK, 3 Sekolah Dasar, dan 1 Sekolah Madrasah Tsanawiyah Negeri. Lebih jelasnya dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.5 Jumlah Sarana Pendidikan Di Desa Wonosari

No	Sarana Pendidikan	Tahun	Jumlah
1	TK	2018	2
2	SD/Sekolah Dasar	2018	3
3	Sekolah Menengah Pertama	2018	1
	Jumlah	2018	6

Sumber : Data Penelitian, 2018

Selain sarana pendidikan, jumlah pendidikan sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan daerah, adapun penduduk Desa Wonosari dilihat dari tingkat pendidikannya dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.6 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1	Belum Sekolah/Tidak Sekolah/Tk	866
2	SD/Sederajat	394
3	SLTP/Sederajat	451
4	SLTA/Sederajat	1.730
5	Akademi/Sederajat/D3	144
6	Perguruan Tinggi/Sederajat (S1)	157
7	Magister (S2/Dokter (S3)	10
	Jumlah	3752

Sumber : Data Penelitian, 2018

Dari tabel IV.6 dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Wonosari merupakan tamatan SLTA, berjumlah 1.730 orang kemudian disusul orang yang Belum Sekolah/Tidak Sekolah/Tk dengan jumlah 866 orang dan SD dengan jumlah 394 orang, SLTP dengan jumlah 451 orang, Akademi/ Sederajat/D3

dengan jumlah 144 orang, Perguruan Tinggi (S1) dengan jumlah 157 kemudian Magister (S2)/Dokter (S3) dengan jumlah 10 orang.

E. Sarana Prasarana Dan Akuntabilitas

Dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Sarana prasarana menjadi salah satu alat yang harus ada dan penting dalam memperlancar segala urusan pelayanan. Oleh karena itu hendaknya sarana prasarana dapat lengkapi.

Saranan Prasarana dan akuntabilitas yang ada di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Pada Tahun 2018 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.7 Sarana Prasarana dan Akuntabilitas yang ada dikantor Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis.

No	Jenis Sarana	Jumlah	Keadaan
1	Kantor Desa	1 buah	Baik
2	Gedung Pertemuan	1 buah	Baik
3	Ruang Rapat	1 buah	Baik
4	Ruang Data	1 buah	Baik
5	Meja Kerja	10 buah	Baik
6	Kursi Tamu	4 buah	Baik
7	Lemari	11 buah	Baik
8	Komputer	6 buah	Baik
9	Kursi Plastik	200 buah	Baik
10	Kendaraan Dinas Roda Dua	1 buah	Baik

Sumber : Monografi Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis

Dari tabel IV.7 disimpulkan bahwa sarana prasarana di aparaturn pemerintahan Desa Wonosari memiliki semua sarana yang dibutuhkan, seperti gedung pertemuan, ruan rapat, ruang data, meja kerja, kursi tamu, lemari, komputer, kursi plastik kendaraan roda dua semuanya dalam keadaan baik dan lengkap. Dengan adanya sarana dan prasarana yang sudah lengkap, sehingga

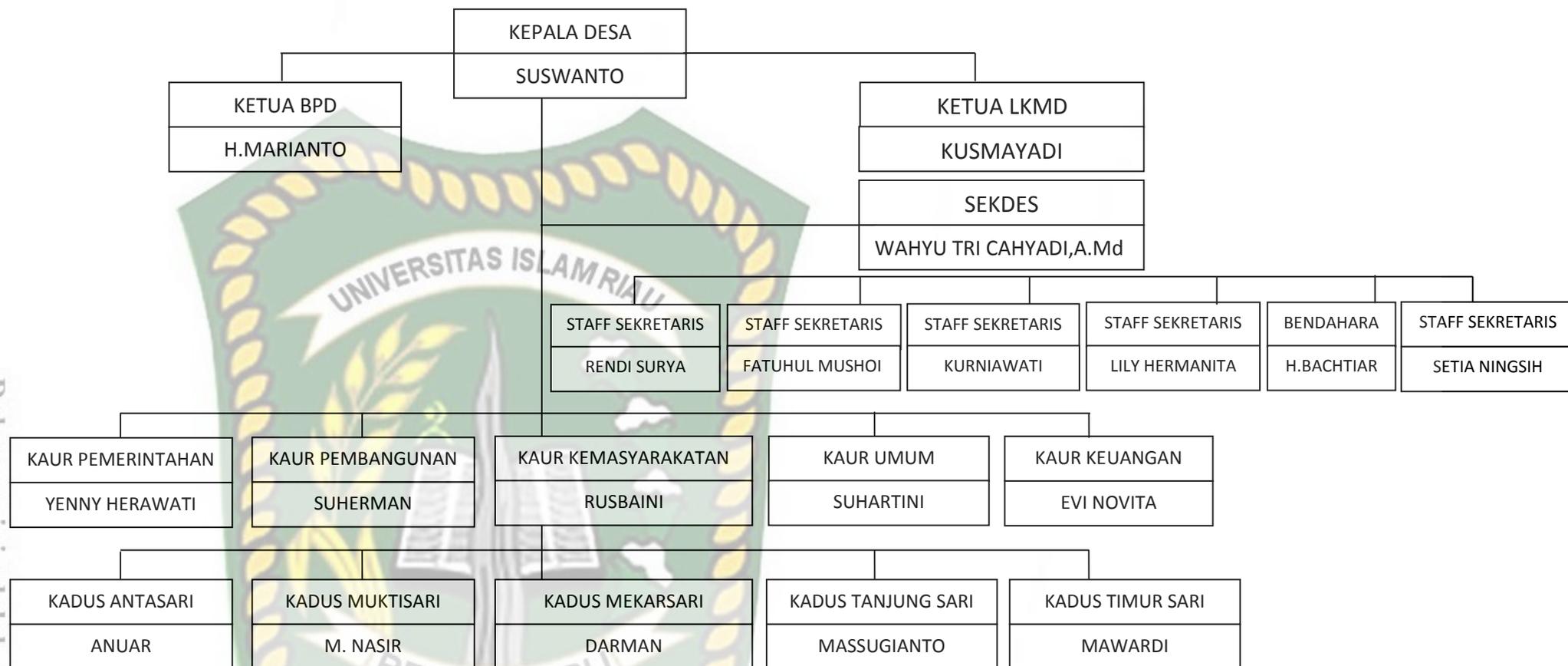
diharapkan perangkat Desa dapat memberikan kinerja yang baik dan pelayanan yang prima terhadap masyarakat.

F. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Untuk Melaksanakan program pemerintah maka perlu ditinjau kembali keadaan desa yang mungkin saja dapat melaksanakan tugas-tugas umum Pemerintahan di suatu Desa. Adapun Susunan Organisasi Pemerintah Desa Wonosari terdiri dari :

- a. Kepala Desa
- b. Ketua BPD
- c. Ketua LKMD
- d. Sekretaris Desa
- e. Bendahara
- f. Kepala Urusan, terdiri dari :
 - i. Kaur Pemerintahan
 - ii. Kaur Pembangunan
 - iii. Kaur Kemasyarakatan
 - iv. Kaur Umum
 - v. Kaur Keuangan
- g. Kepala Dusun, terdiri dari :
 - i. Kadus Antasari
 - ii. Kadus Muktisari
 - iii. Kadus Mekarsari
 - iv. Kadus Tanjung Sari
 - v. Kadus Timur Sari

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR DESA WONOSARI
KECAMATAN BENGKALIS



Dari Gambar IV.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa diatas Kepala Desa merupakan orang pertama di desa yang memikul beban dan tanggung jawab terhadap desa di dalam mengelola keuangan desa dan dibantu oleh perangkat desa merintahan desa tetap berjalan dengan lancar.

G.Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemerintahan Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Adapun tupoksi dari masing-masing jabatan pada struktur organisasi diatur dalam Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Perangkat Desa Dalam Kabupaten Bengkalis.

a. Kepala Desa

Kepala Desa sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :

- a) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, melakukan perlindungan upaya masyarakat, administrasi kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah
- b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, danp pembangunan bidang pendidikan, kesehatan
- c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan tenagakerjaan
- d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna

- e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.

untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Sekretaris Desa mempunyai fungsi :

- a) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspidisi
- b) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- c) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya
- d) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring, dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

c. Kepala Urusan

Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan,. untuk melaksanakan tugas

Kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a) Kepala Urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspidisi, dan penataan administrasi perangkat Desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum
- b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi

administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan Lembaga Pemerintahan Desa lainnya

- c) Kepala Urusan Perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

d. Kepala Seksi

Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis yang bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana operasional. Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :

- a) Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketenteraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil Desa
- b) Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna
- c) Kepala Seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

e. Kepala Dusun

Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kesatuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas wilayahnya.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi :

- a) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya
- c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penelitian yang menyangkut judul Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dalam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, penulis mengambil data yang dibutuhkan dalam mengambil kesimpulan dari permasalahan. Adapun hasil penelitian dan pembahasan dapat dipaparkan berikut ini :

A. Identitas Responden

Identitas responden diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan (jelas) antara data dengan responden dengan analisis yang dilakukan, identitas responden juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Dalam mendapatkan data yang diperlukan maka peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Desa, dan menyebarkan kuisisioner sebanyak 32 rangkap kepada Staf BUMDes dan Masyarakat. Adapun identitas dari responden yang penulis paparkan pada penelitian berdasarkan jenis kelamin, umur responden, dan tingkat pendidikan.

1. Identitas responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Berdasarkan hasil penelitian identitas responden menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Laki-laki	24	75%
2	Perempuan	8	25%
Jumlah		32	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2018

Dari hasil data yang diidentifikasi pada tabel V.1 tersebut diatas maka dapat diterangkan bahwa jumlah responden laki-laki berjumlah 24 dengan persentase 74(%) sedangkan jumlah responden perempuan berjumlah 8 dengan persentase 25(%)

2. Identitas responden Berdasarkan jenjang pendidikan terakhir.

Pendidikan menjadi faktor penting bagi kehidupan bangsa dan negara. pendidikan menjadi faktor penting diseluruh sektor kehidupan, karena majunya suatu negara berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Dengan tingginya tingkat pendidikan juga menjadikan cara berpikir masyarakat lebih maju dalam menjalankan aktifitasnya, baik itu dilingkungan sosial maupun lingkungan pribadi. Pendidikan juga merupakan hal yang sangat mempengaruhi didalam memepengaruhi pekerjaan yang diyakini sangat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk memberikan penilaian terhadap cara berfikir dan tingkat wawasan yang dimiliki seseorang. Oleh karena itu penulis menilai sangat perlu memberikan penjelasan identitas responden berdasarkan tingkat pendidikan akhir. Untuk lebih jelasnya mengenai pendidikan terakhir responden penulis paparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel V.2 Klasifikasi responden berdasarkan jenjang pendidikan terakhir

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Lulusan SD	-	
2	Lulusan SLTP	-	
3	Lulusan SLTA	17	53 %
4	Lulusan S1	15	47 %
Jumlah		32	100 %

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2018

Dari Tabel V.2 diatas bahwa berdasarkan tingkat pendidikan maka didapatkan Lulusan SLTA berjumlah 17 orang dengan persentase 53% dan lulusan S1 berjumlah 15 orang dengan persentase 47%, sedangkan Lulusan SD Dan SLTP tidak ada. Jika melihat tingkat pendidikan yang dimiliki oleh responden maka dapat dikategorikan SDM yang bagus. Karena mayoritasnya adalah tamatan pendidikan SLTA, dan tamatan S1 cukup banyak.

3. Identitas Berdasarkan Latar Belakang Usia.

Usia adalah salah satu faktor yang bisa mempengaruhi kinerja seseorang, dimana orang dikategorikan dewasa dinilai mampu memecahkan masalah-masalah dengan baik, akan tetapi faktor dari usia juga dapat mempengaruhi kinerja seseorang, dan hal tersebut dapat dilihat dari menurunnya kemampuan fisik dan psikologis, dalam menjalankan tugas-tugas dan tanggung jawabnya.

Untuk melihat pengelompokan responden berdasarkan usia pada penelitian ini, maka bisa melihat tabel dibawah :

Tabel V.3 Klasifikasi Responden berdasarkan latar belakang usia

No	Umur	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	26 s/d 46 Tahun	15	47%
2	46 s/d 51 Tahun	10	31%
3	>51 Tahun	7	22%
Jumlah		32	100%

Sumber : Data Olahan Lapangan, 2018

Pada tabel V.3 tersebut diatas, bahwa dari 32 responden, maka didiapatkan bahwa sebanyak 15 orang atau (47%) adalah usia 26 s/d 46 tahun, dan 10 orang atau (31%) berusia 46 s/d 51 tahun, serta sebanyak 7 orang atau (22%) adalah berusia >51 tahun. Karakteristik responden dengan melihat usia tersebut, telah menceminkan bahwa responden telah memiliki pengalaman yang dapat menjadi contoh dalam masyarakat.

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setelah melakukan penelitian dengan judul Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis Kecamatan Bengkalis, maka didapat data dari responden yang berupa alat pengumpul data yaitu kuesioner dan wawancara, setelah menyebarkan kuesioner, melakukan wawancara dan observasi ke lokasi penelitian maka di dapat hasil penelitian yang akan dijelaskan satu persatu perindikator dapat dilihat dibawah ini :

a. Perencanaan (planning)

Perencanaan diartikan sebagai kegiatan tentang yang harus dipersiapkan sebelum suatu kegiatan dapat dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Seperti ditulis oleh Louis A. Allen (dalam Zulkifli, 2009;54) perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan guna mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya.

Perencanaan adalah kegiatan Komisariss dalam Pengelolaan BUMDes Unggul Sari dengan mempersiapkan sebelum dimulainya kegiatan BUMDes agar pengelolaan dapat berjalan secara efektif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dilapangan, Komisariss Badan Usaha Milik Desa Unggul Sari telah melakukan perencanaan dalam pengelolaan BUMDes. Berdasarkan wawancara dengan Komisariss telah melakukan pertemuan, diskusi dan musyawarah kepada Saff BUMDes dan Masyarakat, sehubungan dengan adanya kegiatan dari Komisariss dalam perencanaan terhadap

pengelolaan BUMDes, maka penulis memaparkan dari tanggapan responden yang tertera pada tabel berikut ini :

Tabel V.4 Distribusi Frekuensi Tanggapan Reponden Mengenai Indikator Perencanaan Di Desa Wonosari 2018

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Menyusun Standar Kinerja	8	16	8	32
2	Memberikan Persetujuan Tata Kerja	8	15	9	32
3	Adanya Pertemuan, Diskusi dan Musyawarah	15	11	6	32

Sumber : Hasil Pengolahan Data lapangan, 2018

Dari tabel V.4 diatas diketahui tanggapan responden untuk indikator Peranan Kepala Desa Dalam Pengolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, dalam melakukan Perencanaan yang dinilai pada item pertama yaitu menyusun standar kinerja sebanyak 8 orang mengatakan Berperan, sebanyak 16 orang mengungkapkan Kurang Berperan dan sebanyak 8 orang mengatakan tidak Berperan.

Pada item kedua, memberikan persetujuan tata kerja ada 8 orang mengatakan Berperan, sebanyak 15 orang mengatakan Kurang Berperan dan sebanyak 9 orang mengatakan Tidak Berperan. Pada item ke tiga yaitu pertemuan, diskusi dan musyawarah sebanyak 15 orang mengatakan Berperan, sebanyak 11 orang mengatakan Kurang Berperan dan sebanyak 6 orang mengatakan Tidak Berperan.

Dari pernyataan responden yang dikategorikan Berperan mereka mengatakan Komisariss dalam perencanaan ada melakukan Pertemuan, Diskusi dan Musyawarah dengan mengundang Perwakilan dari masyarakat dalam membahas pembentukan BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari.

Seiring adanya tanggapan dari responden peneliti juga melakukan wawancara dengan anggota BPD Bapak Harisman (pada hari sabtu tanggal 10 November jam 10:00 Wib) Beliau mengatakan bahwa,

“Kepala Desa ada melakukan pertemuan musyawarah dengan mengundang perwakilan masyarakat dan tokoh masyarakat untuk membahas pembentukan Badan Usaha Milik Desa ini, dan juga membahas jenis usaha yang akan di jalankan BUMDes tersebut”

Selanjutnya Responden yang dikategorikan Kurang Berperan mereka menyatakan bahwa kepala Desa belum ada menyusun standar dan tata kerja untuk Staff BUMDes unggul Sari sehingga menyebabkan kinerja yang tidak efektif. senada dengan tanggapan dari responden yang peneliti lakukan dalam wawancara kepada Kepala Desa Wonosari dan juga sebagai Komisariss BUMDes Bapak Siswanto, (dalam wawancara pada hari Rabu Tanggal 07 November jam 09:00 Wib) mengatakan bahwa :

“saat sekarang ini standar kinerja BUMDes itu lagi dipersiapkan disusun terhadap SOP, tugas direktur, tugas pengawas, tugas staff keuangan dan juga tugas sekretaris itu pastinya SOP itu sudah ada berdasarkan peraturan Bupati, jadi memang kita belum merujuk kepada Peraturan Bupati dan Peraturan Menteri Dalam Negeri terhadap SOP itu”

Berdasarkan tabel V.4 dapat dilihat tanggapan berbagai responden tentang melakukan perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Desa Wonosari. Responden

yang dikategorikan tidak berperan rata-rata mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu dengan adanya tugas Kepala Desa dalam menyusun standar kinerja dan memberikan persetujuan tata kerja.

Dari hasil deksripsi data tentang tanggapan responden, dari tabel diatas untuk melihat hasil tanggapan responden Staff BUMDes dan masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada item Perencanaan, akan peneliti analisis dengan menggunakan rumus skala likert pada tabel dibawah ini :

Tabel V.5 Analisis Distribusi Tanggapan Responden Staff BUMDes dan Masyarakat Mengenai Indikator Perencanaan Di Desa Wonosari 2018

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Terlaksana	
		3	2	1	
1	Menyusun Standar Kinerja	24	32	8	64
2	Memberikan Persetujuan Tata Kerja	24	30	9	63
3	Adanya Pertemuan, Diskusi dan Musyawarah	45	22	6	73
Total Skor					200
Skor Tertinggi = $32 \times 3 = 96$ 3 Indikator = $96 \times 3 = 288$ Persentase Jawaban Responden = $\frac{200}{288} \times 100\% = 69,44 = 69\%$					

Sumber : Hasil Pengolahan Data Lapangan 2018

Berdasarkan tabel V.5 setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden Staff BUMDes dan Masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada item (Pengelolaan) memperoleh hasil persentase rentang nilai 69% dengan berkategori Kurang Berperan.

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari manajemen dilaksanakan untuk dan mengatur seluruh sumber-sumber yang dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan sukses. Manusia merupakan unsur terpenting melalui pengorganisasian manusia dapat didalam tugas-tugas yang saling berhubungan. (dalam George R. Terry, 1990;73)

Pengorganisasian adalah kegiatan yang dilakukan Komisariss dalam pengorganisasian BUMDes unggul Sari yang dilaksanakan dalam menentukan Direksi BUMDes dan melakukan pengkoordinasian terhadap Direksi.

Sehubungan adanya kegiatan Komisariss dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berupa pengorganisasian terhadap Staff BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari, dilihat dari sub indikator mengkoordinasi direksi, melindungi BUMDesa, memberikan persetujuan susunan organisasi bisa dilihat tanggapan dari responden penelitian yang tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel V.6 Distribusi Frekuensi Tanggapan Reponden Mengenai Indikator Pengorganisasian Di Desa Wonosari 2018

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Mengkoordinasi Direksi	11	12	9	32
2	Melindungi BUM Desa	8	15	9	32
3	Memberikan persetujuan susunan Organisasi	8	14	10	32

Sumber : Data Penelitian lapangan, 2018

Dari tabel V.6 diatas diketahui tanggapan responden untuk indikator Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengorganisasian dinilai pada item pertama yaitu mengkoordinasi Direksi sebanyak 11 orang mengatakan Berperan, sebanyak 12 orang mengungkapkan Kurang Berperan dan sebanyak 9 orang mengungkapkan Tidak Berperan.

Pada item kedua yaitu melindungi BUMDesa sebanyak 8 orang mengatakan Berperan, sebanyak 15 orang mengatakan Kurang Berperan dan sebanyak 9 orang mengatakan tidak berperan. Pada item ke tiga yaitu memberikan persetujuan susunan organisasi sebanyak 8 orang mengatakan Berperan, sebanyak 14 orang mengatakan kurang berperan dan sebanyak 10 orang mengatakan tidak berperan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Staff Bumdes dan Masyarakat Desa Wonosari responden yang dikategorikan berperan tersebut mengatakan bahwa Kepala Desa ada melakukan Pengorganisasian dengan

mengkoordinasi Staff Bumdes seperti melakukan rapat kepada Staff Bumdes dengan membahas permasalahan yang ada di dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wonosari.

Seiring dengan tanggapan dari responden peneliti juga melakukan wawancara dengan Direktur BUMDes Unggul Sari Bapak H. Irman (pada hari Rabu Tanggal 07 November jam 02:00 Wib) Beliau mengatakan bahwa,

“Kepala Desa dalam mengoordinasi Direksi yaitu, Kepala Desa memfasilitasi Staff BUMDes Unggul Sari untuk melakukan Rapat dengan membahas permasalahan-permasalahan yang ada”.

Selanjutnya responden yang dikategorikan Kurang Berperan mereka mengatakan bahwa Kepala Desa dalam memberikan persetujuan susunan organisasi jarang melibatkan masyarakat dusun lain untuk menjadi pengurus BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari.

Seiring dengan tanggapan responden diatas juga dilakukan wawancara penulis dengan salah satu responden masyarakat Desa Wonosari bapak Fuad pada hari kamis Tanggal 08 November jam 03:00 Wib) Beliau mengatakan bahwa,

“Kepala Desa dalam memberikan persetujuan susunan organisasi BUMDes jarang melibatkan masyarakat dusun lain untuk menjadi pengurus di BUMDes Unggul Sari tersebut, dan dalam menentukan pengurus tidak ada sosialisasi dalam proses pergantian pengurus yang sudah berganti tiga kali, sehingga masyarakat yang mempunyai kompetensi tidak bisa menjadi pengurus”

Tanggapan responden yang dikategorikan Tidak Berperan mereka mengatakan bahwa Kepala Desa tidak ada memberikan sosialisasi tentang pergantian susuan pengurus organisasi BUMDes Unggul Sari.

Dari hasil deskripsi data tentang tanggapan responden, dari tabel diatas untuk melihat hasil tanggapan responden Staff BUMDes dan masyarakat di Desa Unggul Sari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada item pengorganisasian, akan peneliti analisis dengan menggunakan rumus skala likert pada tabel dibawah ini :

Tabel V.7 Analisis Tanggapan Responden Staff BUMDes dan Masyarakat Mengenai Indikator Pengorganisasian Di Desa Wonosari 2018

No	Sub Indikator	Kategori Ukuran Penilaian			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Terlaksana	
		3	2	1	
1	Mengkoordinasi Direksi	33	24	9	66
2	Melindungi BUM Desa	24	30	9	63
3	Memberikan persetujuan susunan Organisasi	24	38	10	62
Total Skor					191
Skor Tertinggi = $32 \times 3 = 96$ 3 Indikator = $96 \times 3 = 288$ Persentase Jawaban Responden = $\frac{191}{288} \times 100\% = 66,31$ = 66%					

Sumber : Hasil Pengolahan Data Lapangan 2018

Berdasarkan tabel diatas setelah di analisis dengan menggunakan rumus skala likert tanggapan responden Staff BUMDes dan Masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada item (Pengorganisasian) memperoleh hasil persentase 66% dengan berkategori Kurang Berperan.

c. Penggerakan

Menunjukkan bahwa hasil dari utama dari pelaksanaan fungsi pengorganisasian itu disamping struktur organisasi adalah rumusan tertulis seperangkat tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab setiap pimpinan struktural atau manajer serta setiap individu personil organisasi. Sejumlah hal yang di ikhtiarkan itu secara teroris terakup dalam fungsi pergerakan (actuating)

Menurut Zulkifli (2009;113) penggerakan bermakna menggunakan berbagai pendekatan baik yang bersifat persuasif maupun mobilitatif yang bertujuan kepada menjadikan personil organisasi mau secara tidak terpaksa atas dasar kesadaran pribadi melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap tugas, yang telah didelgasikan atau diperintahkan kepadanya.

Penggerakan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Komisaris dalam Pengelolaan BUMDes Unggul Sari yang dilaksanakan untuk yang bertujuan untuk menjadikan pegurus organisasi mau secara tidak terpaksa atas dasar kesadaran pribadi melaksanakan secara sungguh-sungguh setiap butir dari tupoksi, dan tanggung jawab yang telah didelgasikan atau yang diperintahkan kepadanya.

Sehubungan adanya kegiatan Komisaris dalam Pengelolaan BUMDes berupa penggerakan terhadap Staff BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari, maka dapat dilihat tanggapan responden penelitian pada tabel berikut :

Tabel V.8 Distribusi Frekuensi Tanggapan Reponden Mengenai Indikator Penggerakan Di Desa Wonosari 2018

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Meremberikan nasihat	11	13	8	32
2	Memberikan sosialisasi	7	11	14	32
3	Adanya pemberian dorongan	12	12	8	32

Sumber : Data Penelitian lapangan, 2018

Dari tabel V.8 diatas diketahui tanggapan responden untuk indikator Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam melakukan penggerakan dinilai pada item pertama yaitu memberikan nasihat sebanyak 11 orang mengatakan Berperan, sebanyak 13 orang mengatakan Kurang Berperan dan sebanyak 8 orang mengatakan Tidak Berperan.

Pada item kedua yaitu memberikan saran sebanyak 7 orang mengatakan Berperan, sebanyak 11 orang mengatakan Kurang Berperan dan sebanyak 14 orang mengatakan tidak berperan. Pada item ke tiga yaitu adanya pemberian dorongan sebanyak 12 orang mengatakan Berperan, sebanyak 12 orang mengatakan kurang berperan dan sebanyak 8 orang mengatakan tidak berperan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Staff BUMDes Wonosari yang dikategorikan berperan tersebut mengatakan bahwa Kepala Desa ada memberikan penggerakan seperti memberikan nasihat dan saran dalam pertemuan rapat rutin BUMDes Ungul Sari. Mereka juga mengatakan bahwa kepala desa memberikan dorongan kepada staff untuk kemajuan BUMDes.

Seiring dengan tanggapan dari responden peneliti juga mewawancarai Direktur BUMDes Unggul Sari Bapak H. Irman (pada hari Rabu Tanggal 07 November jam 02:00 Wib) Beliau mengatakan bahwa,

“Kepala Desa ada memberikan nasihat dan saran pada saat pertemuan rapat atau pertemuan diskus dengan Direktur BUMDes Unggul Sari, dan juga adanya dorongan bagaimana supaya BUMDes Unggul Sari dapat maju dan bermanfaat bagi masyarakat Wonosari khususnya”

Selanjutnya responden yang dikategorikan Kurang Berperan mereka mengatakan bahwa Kepala Desa jarang memberikan nasihat, saran dan dorongan. Diberikan pada waktu tertentu saja, tidak secara rutin. Seiring dengan tanggapan dari responden peneliti juga melakukan wawancara dengan Ketua Unit waserda BUMDes Unggul Sari Bapak Budi (pada hari Minggu Tanggal 04 November jam 03:00 Wib) Beliau mengatakan bahwa,

“Kepala Desa ada memberikan nasihat, saran dan dorongan tapi diberikan pada saat pertemuan rapat bulanan dan jarang juga datang ke warung”

Tanggapan responden yang dikategorikan tidak berperan mereka mengatakan Kepala Desa tidak berperan rata-rata mereka mengatakan bahwa Kepala Desa tidak memberikan sosialisasi terhadap keberadaan BUMDes dan jenis usaha yang dimiliki.

Dari hasil deskripsi data tentang tanggapan responden, dari tabel diatas untuk melihat hasil tanggapan responden Staff BUMDes dan masyarakat di Desa Unggul Sari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada item

d. Pengawasan

Menurut Siagian (dalam Yusri Munaf, 2016;100) pengertian dari pengawasan merupakan pengamatan yang dilakukan dalam kegiatan organisasi agar apa yang sudah dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Pengawasan menjadi kegiatan yang dilakukan Komisaris dalam pengelolaan BUMDes Unggul Sari dengan melakukan pengamatan pada seluruh kegiatan yang dilakukan Staff BUMDes agar kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan yang ditentukan.

Sehubungan adanya kegiatan Komisaris dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berupa penggerakan terhadap Staff BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari, penulis memaparkan hasil dari tanggapan responden penelitian dalam tabel dibawah ini :

Tabel V.10 Distribusi Frekuensi Tanggapan Reponden Mengenai Indikator Pengawasan Di Desa Wonosari 2018

No	Item Penilaian	Skala Ukuran			Jumlah
		Berperan	Kurang Berperan	Tidak Berperan	
1	Pengawasan Langsung	11	13	8	32
2	Pengawasan melalui laporan	8	14	10	32
3	Pengawasan melalui kuisisioner	3	15	14	32
4	Pengawasan melalui Wawancara	8	14	10	32

Sumber : Data Penelitian lapangan, 2018

Dari tabel V.10 diatas diketahui tanggapan responden untuk indikator Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan dinilai pada item pertama yaitu pengawasan langsung sebanyak 11 orang mengatakan Berperan, sebanyak 13 orang mengungkapkan Kurang Berperan, sebanyak 8 orang mengungkapkan Tidak Berperan.

Pada item kedua yaitu memberikan pengawasan melalui laporan, adanya 8 orang mengungkapkan Berperan, sebanyak 14 orang mengungkapkan Kurang Berperan dan sebanyak 10 orang mengungkapkan tidak berperan. Pada item ke tiga yaitu adanya pengawasan melalui kuisioner 3 orang mengatakan Berperan, sebanyak 15 orang mengatakan kurang berperan dan sebanyak 14 orang mengatakan tidak berperan. Pada item keempat yaitu pengawasan melalui wawancara 8 orang mengatakan berperan, sebanyak 14 orang mengatakan kurang berperan, dan sebanyak 10 orang mengatakan tidak berperan.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan terhadap Staff BUMDes Desa Wonosari responden yang dikategorikan berperan tersebut mereka mengatakan bahwa Kepala Desa ada memberikan pengawasan seperti memberikan pengawasan langsung dengan datang melihat kegiatan waserda.

Seiring dengan adanya tanggapan responden diatas juga dilakukan wawancara penulis dengan Kepala Desa Wonosari dan juga sebagai Komisaris BUMDes Bapak Siswanto, (dalam wawancara pada hari Rabu Tanggal 07 November jam 09:00 Wib) mengatakan bahwa :

“Dalam pengawasan BUMDes Unggul Sari Kepala Desa ada datang langsung melihat kegiatan usaha waserda dan juga memerintah kepala dusun untuk mengawasi unit usaha yang ada di wilayahnya”

Tanggapan responden yang dikategorikan Kurang Berperan mereka mengatakan bahwa kepala Desa jarang melakukan pengawasan langsung dengan datang ke unit usaha BUMDes. Tanggapan ini sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Unit waserda BUMDes Unggul Sari Bapak Budi (pada hari Minggu Tanggal 04 November jam 03:00 Wib) Beliau mengatakan bahwa,

“Kepala Desa ada datang langsung ke tempat unit kedai tetapi sangat jarang, jika datang beliau duduk-duduk dan ngobrol tentang kedai, dan tidak ada meminta laporan”

Dari tabel V.10 diatas juga dapat dilihat bahwa tanggapan dari berbagai responden tentang pengawasan oleh Komisaris BUMDes Unggul Sari desa Wonosari yang dikategorikan tidak berperan mereka mengatakan bahwa kepala desa tidak ada meminta laporan. Dari hasil deskripsi data tentang tanggapan responden.

Dari tabel diatas untuk melihat hasil tanggapan responden Staff BUMDes dan masyarakat di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis pada item pengawasan, akan peneliti analisis dengan menggunakan rumus skala likert pada tabel berikut ini :

e. Rekapitulasi Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis

Tabel V.12 Rekapitulasi Analisis Tanggapan Responden Tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Tahun 2018

No	Indikator	Rekapitulasi
1	Perencanaan (Planning)	69,44
2	Pengorganisasian (Organizing)	66,31
3	Penggerakkan (Actuating)	66,66
4	Pengawasan (Controlling)	63,54
Rata-rata		66,48
Persentase		66%

Sumber : Hasil Pengolahan data lapangan, 2018

Dari tabel diatas merupakan tabel rekapitulasi hasil analisis data tanggapan responden tentang Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Untuk responden Staff BUMDes dan Masyarakat berjumlah 32 orang dan mendapatkan persentase rentang nilai dari kuisisioner yang disebarkan dari tiga indikator rata-rata 66,48 dengan persentase 66% dengan kategori Kurang Beperan.

Artinya Pengelolaan yang dilakukan oleh Kepala Desa baik itu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan terhadap BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari dilaksanakan, akan tetapi tidak optimal karena dilaksanakan tidak secara rutin yang membuat ketidak efektifan kinerja Staff BUMDes. Hal inilah yang menimbulkan adanya beberapa pendapat responden terkait dengan tugas Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan BUMDes

tersebut, berdasarkan hasil dokumentasi, angket, observasi dan wawancara penulis dilokasi penelitian, yang mana dapat dilihat dari hasil survey peneliti terhadap Staff BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari.

C. Faktor-faktor yang menghambat dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis.

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan memberikan kuisioner, wawancara, observasi dan dokumentasi, didapatkan faktor yang menjadi hambatan bagi kegiatan Pengelolaan BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yaitu :

- a. Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes Wonosari dan jenis usaha yang sudah ada, yang menyebabkan belum antusiasnya masyarakat untuk memanfaatkan usaha yang sudah ada tersebut.
- b. Masih rendahnya sumber daya manusia (staff BUMDes) tidak memahami apa yang harus dikerjakan dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa
- c. Masih kurangnya inovasi dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan BUMDes, sehingga tidak ada potensi sumber daya alam yang dikelola.
- d. Masih kurangnya disiplin Staff BUMDes dalam menjalankan usaha waserda dan terlihat sibuk dengan pekerjaan lain yang dimilikinya sehingga Kinerja dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Unggul Sari Desa Wonosari ini tidak efektif.

BAB VI

PENUTUP

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Peranan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, maka penulis menyimpulkan dan memberi saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pada setiap indikator pada penelitian ini dapat diketahui bahwa pengelolaan yang dilakukan Kepala Desa sebagai Komisaris BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari dapat dikategorikan Kurang Berperan, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden, sesuai dengan teknik perhitungan penulis lakukan. Peneliti menemukan masih kurangnya Kepala Desa dalam melakukan Perencanaan dalam pengelolaan BUMDes, Kurangnya Kepala Desa mensosialisasikan kepada masyarakat tentang keberadaan BUMDes dan usaha Waserda (warung serba ada) yang dimiliki BUMDes tersebut sehingga menyebabkan transaksi yang tidak lancar dan menyebabkan waserda ini tutup dan kurangnya Kepala Desa dalam pengawasan dengan meminta laporan transaksi usaha.
2. Dalam pelaksanaan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Unggul Sari banyak hambatan yang dihadapi oleh Kepala Desa sebagai Komisaris di BUMDes Unggul Sari Kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada

masyarakat tentang keberadaan BUMDes Unggul Sari dan usaha yang ada, dan belum antusiasnya masyarakat untuk memanfaatkan usaha yang sudah ada tersebut. Tidak adanya inovasi dalam menentukan jenis usaha yang akan dijalankan BUMDes, sehingga tidak ada potensi sumber daya alam yang dikelola. Kemudian pegawai BUMDes terlihat sibuk dengan pekerjaan lain yang dimilikinya sehingga Kinerja dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa Unggul Sari Desa Wonosari ini tidak efektif.

B. Saran

Adapun saran yang dikemukakan dalam penelitian Peranan Kepala Desa Dalam Pengeloan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Wonosari Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis ini adalah :

1. Kepala Desa dan pegawai beserta pemerintah harus lebih serius dalam mengelola Badan Usaha Milik Desa agar dapat tercapai tujuan dari pembentukan BUM Desa seperti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber pendapatan desa, mendorong berkembangnya kegiatan ekonomi di desa, meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa.
2. Kepala Desa dan Staff BUMDes harus lebih mensosialisasikan program serta usaha dari BUMDes, agar masyarakat dapat mengetahui dan ikut berpartisipasi mengelola BUMDes Unggul Sari Desa Wonosari.

3. Kepala Desa Harus memberikan sanksi yang tegas kepada Direksi Apabila Badan Usaha Milik Desa mengalami Bangkrut atau tidak berjalan dengan lancar.
4. Kepala Desa harus memberikan nasihat, memberikan dorongan dan harus lebih tegas lagi dalam melakukan pengawasan dan memberikan sanksi yang tegas bagi Staff BUMDes yang tidak mau mengikuti arahan dari Kepala Desa
5. Staff BUMDes harus lebih sering melakukan kajian dengan melihat BUMDes-BUMDes yang sudah berhasil, dan dapat menerapkannya di BUMDes Unggul Sari
6. Masyarakat dan pengurus harus lebih kompak dan bersatu untuk memajukan BUMDes unggul sari, apabila unit usaha dikelola dengan baik dan serius akan dapat membuka jenis unit usaha baru yang akan dapat menambah pendapatan asli desa dan juga mengurangi pengangguran di Desa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- Abdullah, Ma'ruf. 2014. *Manajemen dan Evaluasi Kinerja Karyawan*. Yogyakarta : Aswaja Presindo
- Arenawati, 2014. *Administrasi Pemerintahan Daerah (Sejarah Konsep, dan Penatalaksanaan di Indonesia)*. Jakarta : Graha Ilmu.
- Ardinto, Elvinaro, 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung, Simbiosis Rekatama Media
- George R. Terry. 1990. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Labolo, Muhadam. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Latipun. 2006. *Psikologi Konseling*. Malang : UMM Press
- Kompri. 2015. *Manajemen Pendidikan 1*. Bandung : Alfabeta
- Malayu S.P. Hasibuan. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Bumi Aksara
- Munir, Dasril, 2004. *Kebijakan Manajemen Keuangan Daerah Yogyakarta*. Yayasan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI)
- Munaf, Yusri 2016. *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- M. Manulang, 1990. *dasar-dasar manajemen*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ni'matul Huda, 2010. *Ilmu Negara*. Jakarta : Rajagrafindo Persada.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005, *Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan pemerintahan Desa*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Rahyunir Rauf & Sri Maulidiah. 2016. *Badan Permusyawaratan Desa: Pekanbaru* : Zanafa publishing
- Rahyunir Rauf & Yusri Munaf, 2015. *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru : Zanafa Publishing
- Siagian, Sondang P, 2001, *Administrasi Pembangunan (Konsep Dimensi dan Strategi)*. Jakarta, Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P, 2003, *Filsafat Administrasi*, Jakarta PT. Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung, PT. Reika Aditama.

- Soekanto, Soerjono, 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta, Raja Grando Persada.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Siswanto.2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara
- Soemantri, Januari.2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta : Focus Media.
- Wastiono, Sadu & Simangunsong, Fernandes. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Bandung : IPDN Jatinagor
- Wibowo. 2010. *Manajemen Kinerja*, jakarta :Rajawali Press.
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa. Berdasarkan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*.jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Zulkifli dan Moris A. Yogia, 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Zulkifli dan Nurmasari, 2015. *Pengantar Manajemen*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.

Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen :

Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Undang-Undang 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Desa Wonosari Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Unggul Sari Desa Wonosari